BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam pertumbuhan masyarakat sosial di era modern seperti saat ini sangatlah cepat, sehingga pada akhirnya melahirkan nilai norma dan muncul kebiasaan yang tumbuh di kalangan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat bisa menyesuaikan perkembangan saat ini secara strategis. Pengetahuan dalam bidang kedokteran adalah salah satu dari banyaknya perkembangan zaman modern saat ini, yang artinya ilmu kedokteran sendiri juga tidak kalah penting dengan eksistensi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu dalam bidang kedokteran mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, secara sosial peran dari ilmu ini adalah sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat sehingga setiap orang yang merasa dirinya atau bahkan orang disekitarnya tidak sehat timbul perasaan sekaligus tindakan agar membawa diri mereka sendiri atau merujuk seseorang kepada dokter dengan harapan bisa kembali sembuh. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja ada resiko tersendiri seperti waktu menjalankan proses pengobatan hasilnya bisa kembali sembuh atau bahkan semakin memburuk, bahkan kematian adalah kemungkinan yang lain yang tidak di harapkan oleh manusia.

Membahas terkait kematian, ada beberapa faktor dalam ilmu pengetahuan yang bisa menyebabkan kematian³, contohnya adalah euthanasia. Euthanasia sendiri sampai saat ini masih menjadi polemik perdebatan akan boleh atau tidaknya praktik tersebut. Secara bahasa euthanasia mempunyai arti dari kata *Eu* yang berarti baik dan *Thanatos* yang berarti mati, secara singkatnya euthanasia bisa diartikan bahwa praktik ini menyebabkan kematian secara sengaja dengan tujuan yang menguntungkan. Umumnya, praktik euthanasia terlaksana dengan metode ilmu kedokteran melalui dokter, walaupun dengan cara tersebut sampai saat ini praktik euthanasia bukan hal yang dibenarkan dan masih menjadi hal yang tabu bagi banyak orang. Paradigma tentang kematian jenis euthanasia ini menimbulkan pro dan kontra di sebagian kalangan masyarakat, sehingga euthanasia menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk diteliti.⁴ Euthanasia dalam ilmu medis mempunyai istilah *mercy killing* pegertiannya yaitu “pembunuhan tanpa penderitaan” yang diperuntukkan kepada seorang pasien yang sudah tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh kembali.⁵

Pada tahun 1952 Kasus euthanasia di negara kincir angin Belanda menjadi kasus yang pertama di negara tersebut, dimana pengadilan di Utrecht pada saat itu tepatnya pada tanggal 11 Maret 1952 memutuskan hukuman bersyarat kepada seorang dokter dengan kasu menyanggupi permintann

³ Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 9-10.

⁴ Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Buku Kedokteran EGC), hal .118.

⁵ Surat Edaran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) No.702/PB/H.2/09/2004 tentang *Euthanasia*.

kakaknya untuk membantu mengakhiri hidupnya yang sangat amat menyiksa yang disebabkan oleh sebuah penyakit. Selanjutnya, hal serupa juga terjadi pada kasus *Leeuwarder Euthanasia proses 1973*⁶, kasus yang bertempat pada pengadilan Leeuwarder pada tanggal 21 Januari 1973 majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman bersyarat selama satu minggu kepada seorang wanita yang bernama Poskan dengan kasus mengakhiri hidup ibunya sendiri dengan sebuah suntikan yang dikarenakan ibunya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Melihat dua putusan pada pengadilan diatas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia di negara Belanda pada saat itu masih dianggap perbuatan yang dilarang.

Di indonesia sendiri kasus euthanasia juga telah terjadi beberapa kali, seperti kasus yang diketahui oleh penulis adalah pada tahun 2004 kasus euthanasia terjadi pada seorang pasien yang bernama Agian Isna Nauli atau Ny Agian, perlu diketahui penyebab Agian tidak meunjukkan kesadarannya selama di rumah sakit adalah ketika se usai menjalani operasi caesar untuk melahirkan anaknya. Imbas dari kejadian tersebut suami Agian yaitu Hasan Kusuma mengajukan ke pihak rumah sakit yang pada saat itu sedang merawat Agian untuk mengakhiri hidup istrinya, dikarenakan kondisi Agian yang koma dan tidak kunjung sadarkan diri dan keterbatasan ekonomi dari keluarganya.⁷

⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hal. 111. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43316-ID-tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf> pada tanggal 12 Januari 2024

⁷ Detik News, *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif> pada tanggal 12 Januari 2024.

Atas pengajuan dari Hasan Kusuma tersebut, pihak rumah sakit dengan tegas menolak tindakan tersebut dengan dasar bahwa tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja menurut Kode Etik Kedokteran adalah suatu pelanggaran dan tidak sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.

Masih di tahun yang sama tepatnya pada bulan Oktober 2004 kasus euthanasia terjadi di RSUD Pasar Rebo terhadap seorang pasien yang bernama Siti Zulaeha 23 tahun, pasca menjalani operasi mengalami koma sampai 3,5 bulan dengan diagnosa hamil di luar kandungan namun setelah dilakukannya proses operasi ternyata hanya ditemukan sebuah cairan di sekitar rahim. Akibat dari tindakan operasi tersebut Siti Zulaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Dengan kejadian tersebut suami dari Siti Zulaeha yaitu Rudi Hartono pada tanggal 21 Februari 2005 membuat permohonan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan agar istrinya dilakukan euthanasia.⁸

Kesimpulan dari keempat kasus yang telah dibaca oleh peneliti diatas adalah bahwasannya selain dari faktor ekonomi alasan diajukannya euthanasia disebabkan oleh kondisi pasien yang mengalami penderitaan secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menimbulkan rasa untuk mengakhiri hidupnya entah dari dirinya sendiri ataupun dari pihak keluarga.

Meskipun di Indonesia belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur euthanasia, dengan melihat kasus diatas bahwa sebelum melakukan

⁸ Tempo, *Suami Siti Zulaeha Menilai Euthanasia Adalah Tindakan Terbaik*, Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/56744/suami-siti-julaeha-menilai-euthanasia-adalah-keputusan-terbaik> pada tanggal 16 Januari 2024.

euthanasia harus dilakukan proses pengajuan permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang artinya walaupun belum ada aturan yang spesifik yang mengatur euthanasia tindakan ini tidak bisa dilakukan secara begitu saja alias sembarangan.

Penghilangan nyawa diri sendiri ataupun kepada nyawa orang lain adalah sebuah tindakan pidana, namun sampai sekarang hal ini masih menimbulkan gejala paradigma tentang euthanasia yang menimbulkan perdebatan oleh masing-masing pihak yang menolak ataupun menyetujui euthanasia, setiap pihakpun mempunyai berbagai argumen tentang praktik euthanasia termasuk orang yang menolak keras euthanasia mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan itu termasuk melanggar hak hidup orang tersebut. Sedangkan pihak yang meyetujui euthanasia mereka melihat dari berbagai kasus permasalahan yang berujung pada euthanasia yang berpendapat bahwa tindakan ini timbul karena permintaannya sendiri maupun dari pihak keluarganya sehingga, berdasarkan alasan tersebutlah mereka beralasan bahwa euthanasia bisa dilakukan karena faktor belas kasihan dan bukan termasuk dalam unsur tindakan pidana.⁹

Di Indonesia, undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan dasar untuk membuat peraturan. mengenai ketentuan undang-undang ini yang mewajibkan adanya asas kepastian hukum dalam setiap materi muatan undang-undang.

⁹ Ahmad Muslich Wardi, *Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014)

Akan tetapi, dalam kenyataannya prinsip kepastian hukum sering kali diabaikan selama proses membuat peraturan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab XXI bagian pertama tentang pembunuhan yang menimbulkan keraguan hukum tentang kebijakan euthanasia.

Keraguan hukum euthanasia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dibuktikan dengan ketidakjelasan terkait kebijakan euthanasia di Indonesia yang belum memiliki pengaturan secara khusus terkait pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah pada pasal 461 dan 462 terkait perampasan nyawa seseorang dan terkait fasilitatornya, kedua pasal ini tidak disebutkan secara jelas dan spesifik apakah tindakan euthanasia juga termasuk dalam jangkauan pasal tersebut atau tidak. Maria Farida Indrati dan Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan keputusan dibedakan berdasarkan sifatnya: peraturan (regeling) yaitu umum, abstrak, dan terus menerus, sedangkan keputusan individu, konkret, dan final.¹⁰

Melihat UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP belum dijelaskan secara komprehensif sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap, muncul keraguan hukum tentang tindakan euthanasia. Mengingat bahwa euthanasia memiliki peran penting jika terjadi di kemudian hari dan memiliki hubungan langsung dengan Masyarakat. Jika euthanasia belum diatur secara khusus

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), hal.78 dan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hal. 2

dalam suatu kasus, maka akan ada keambiguan dalam pelaksanaan hukum yang dapat menyebabkan banyak interpretasi dan bahkan mungkin tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menganulir euthanasia. Hal ini penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan legalitas euthanasia. Pemerintah melakukan pembaharuan menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk menanggapi Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan mempertimbangkan penghalang dan masalah yang dapat muncul selama pelaksanaannya. Meskipun ada beberapa peraturan yang diubah, kebijakan euthanasia masih belum dimasukkan secara khusus dalam KUHP. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat peraturan dan rencana khusus tentang kebijakan euthanasia, tentunya dengan cara yang sesuai dengan undang-undang.

Selain tidak adanya kepastian hukum akibat ketidakjelasan pengaturan euthanasia dalam KUHP, pengaturan euthanasia juga tersirat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ada beberapa aturan yang bisa dihubungkan dengan euthanasia termasuk dalam pasal 192 ayat 1, dan 2 yang menyatakan bahwa:¹¹

1. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hal. 84

2. Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia

Kandungan peraturan dari pasal 192 diatas juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada bagian kewajiban rumah sakit pasal 189 ayat 1 (huruf K) yang menjelaskan bahwa rumah sakit berhak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan perundang-undangan. Selain menjelaskan tentang hak dan kewajiban Rumah Sakit, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur tentang hak pasien dan tenaga kesehatan yang masing-masing diatur dalam pasal 276 tentang Hak dan Kewajiban Pasien, dan pasal 273 mengatur tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Terkait penghilangan nyawa hal ini juga berhubungan dengan teori maqasid syari'ah dimana tercantum dalam salah satu unsurnya yaitu *hifz nafs* bahwasannya pentingnya memelihara jiwa (nyawa), keberadaan hidup dan mati adalah sebuah takdir sekaligus cobaan yang diciptakan Allah untuk menguji seberapa besar keimanan manusia kepada penciptanya. Maka dari itu, Islam sangatlah memerhatikan keselamatan jiwa manusia dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah melalui ayat 2 surah Al-Mulk, yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

“Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.¹²

Menjaga nyawa atau jiwa adalah salah satu bentuk dari tujuan akidah Islam, maka dari itu manusia dianjurkan untuk memelihara jiwanya sampai akhir hidupnya supaya tidak mengingkari kehendak Allah dan menggunakan kehidupannya untuk beribadah kepadanya. Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan makan, minum, berpakaian, hidup, dan membutuhkan perawatan jika ia sakit. Namun sebaliknya, manusia akan dirugikan jika dia melakukan pembunuhan atau mengakhiri hidupnya sendiri yang dalam Islam perbuatan tersebut jelas sebuah larangan keras dan wajib dihindari. Apabila jika melanggar mereka yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan maka akan dikenai hukuman qishas dan diyat, dari hukuman tersebut diharapkan bisa/menegakkan aturan kehidupan manusia.¹³

Secara bahasa maqāṣid syari’ah terdiri dari dua kata maqāṣid dari kata jama’ *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, dan syari’ah yang memiliki arti bahwa hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga jika digabungkan maqāṣid syariah memiliki pengertian bahwa adanya kandungan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebuah rujukan dan tujuan dalam sebuah persyariaatan hukum.¹⁴ Tidak hanya dalam Undang-Undang positif saja

¹² Quraish Shihab, *Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019*, QS. Al-Mulk, hal. 828.

¹³ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hal.161.

¹⁴ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 5

pengaturan euthanasia yang belum jelas, namun euthanasia dalam Islam juga masih butuh kepastian terkait perbuatan ini yang dianggap *jarimah* (perbuatan yang melanggar syariah) atau bukan, sehingga dengan maqasid syari'ah euthanasia dapat diketahui manfaat keberadaanya yang menimbulkan kemaslahatan atau kemudhorotan bagi manusia dengan melalui berbagai aspek yang terkandung dalam maqasid syariah.

Dengan memperhatikan berbagai rumusan pasal-pasal diantaranya UU. No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU. No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, kode etik kedokteran serta menurut prinsip maqasid syari'ah. Sekalipun ada alasan yang kuat untuk melakukan praktik tersebut, tindakan euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak hidup seseorang dan termasuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait euthanasia, sehingga penulis memilih judul “Problematika Kebijakan Euthanasia Terhadap Tindak Pidana Perampasan Nyawa Perspektif Maqasid Syari'ah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, pokok permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika kebijakan euthanasia dalam pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa?

2. Bagaimana problematika kebijakan euthanasia dalam pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqasid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan problematika kebijakan *euthanasia* terhadap pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa?
2. Untuk menganalisis problematika kebijakan *euthanasia* dalam pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqasid syariah?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Berlandaskan Hukum Positif dan Maqasid Syari'ah penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi akademisi hukum, dan dengan hasil penelitian ini bisa lebih menambah pengetahuan tentang euthanasia.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Pelaku dan Pihak yang Mengajukan Euthanasia

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi pelaku dan pihak yang mengajukan euthanasia, sehingga jika timbul masalah euthanasia dikemudian hari bisa

diselesaikan dengan baik dan tidak sembarangan sebelum mengambil keputusan.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi sekaligus manfaat bagi pemerintah, sehingga pemerintah dalam meninjau Undang-Undang dan aturan pemerintah lainnya bisa lebih selaras dengan kebutuhan.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu bioetika, hukum pidana, dan maqāṣid syari'ah terkait euthanasia, khususnya dalam kaitannya dengan tidak pidana perampasan nyawa. Skripsi ini menyediakan landasan untuk menganalisis kebijakan kontroversial, mengevaluasi relevansi maqāṣid syari'ah dalam membentuk kebijakan yang adil, serta memperkaya literatur tentang hak hidup dan kematian perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memahami dan mengkritisi kebijakan hukum serta mengadaptasi prinsip maqāṣid syari'ah terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam teknologi dan medis.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan penafsiran pembaca, perlu adanya penjelasan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Problematika

Dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, Abd. Muhith menyatakan bahwa istilah "problematika" berasal dari kata Inggris "problematic", yang berarti persoalan atau masalah, dan "problema" dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang belum dapat diselesaikan yang menimbulkan masalah. Masalah adalah kendala atau persoalan yang perlu diselesaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan kata lain, masalah adalah perbedaan antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan.¹⁵

b. Kebijakan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Peraturan dan hukum tidak sama dengan kebijakan. Kebijakan hanya berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan yang paling mungkin mencapai hasil yang diinginkan jika hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan atau melarang suatu perilaku, seperti undang-undang yang melarang pembunuhan.

¹⁵ Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. 1, 2018, hal 47

c. Euthanasia

Euthanasia adalah sebuah tindakan yang bisa mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya.¹⁶

d. Perampasan Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kata pembunuhan berasal dari kata "bunuh", yang berarti "mematikan" atau "menghilangkan nyawa." Membunuh berarti menyebabkan kematian.

e. Maqāṣid Syari'ah

Maqāṣid syari'ah secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu maqāṣid dan syari'ah. Kata maqāṣid berasal dari kata jama' dari lafadz maqṣid yang mempunyai arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariaḥ mempunyai kandungan arti jalan yang mengarah kepada sumber pokok hukum dari sebuah kehidupan.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis terkait problematika kebijakan euthanasia terhadap pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqāṣid syari'ah.

¹⁶ Alodokter, Diakses dari <https://www.alodokter.com/euthanasia-ketika-mengakhiri-hidup-dianggap-sebagai-jalan-keluar> pada tanggal 25 Januari 2024

¹⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 196.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) adalah sebuah proses yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu sebuah kebenaran yang mamastikan terhadap aturan hukum yang ada apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan norma hukum, dan juga apakah dalam perilaku tindakan (*act*) dari seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum atau prinsip hukum).¹⁸ Dari rujukan tersebut bisa disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini bisa diperoleh dengan hasil yang akurat dan memuaskan bilamana menggunakan metode penelitian yang tepat, yang kemudian meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap tahap penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau istilah lainnya *doctrinal research* yakni penelitian yang berlandaskan materi hukum (*library based*) yang memfokuskan pada suatu bacaan dan belajar dari bahan materi hukum primer maupun sekunder, sehingga dalam sebuah penelitian hukum bisa menghasilkan berbagai konsep dan teori yang aktual sebagai pedoman atau petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang sedang dikaji.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 47.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 55-56.

Penelitian hukum normatif terdiri dari dua jenis data, seperti data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Data sekunder adalah sekumpulan data yang relevan dalam bentuk tertulis seperti yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan, jurnal, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- b) Undang-undang nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Bahan hukum sekunder: jurnal, buku, artikel, dan sumber berbasis internet. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Hukum, ensiklopedia, buku-buku terkait euthanasia dan Maqasid Syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum ada beberapa metode pendekatan yang meliputi pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparative*

²⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet,3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal, 52.

²¹ *Ibid.*, hal. 52.

approach).²² Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami suatu peristiwa kejadian yang terkait dengan fenomena isu yang sedang dikaji, dan sudah menjadi sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.²³

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami serta belajar terkait perundang-undangan dan relevan terhadap fenomena isu hukum yang sedang dikaji.²⁴

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan ide-ide, undang-undang, maupun teori maqāṣid syari'ah yang relevan dengan penelitian ini. Dengan Penelitian metode komparasi penulis bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dengan menuluri jawaban dengan berlandaskan sebab-akibat, dengan cara menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya fenomena yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 299.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), Hal. 94.

²⁴ *Ibid.*, hal. 93.

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain studi kepustakaan, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga berdasarkan bahan hukum tersebut penulis bertujuan untuk menyusun data secara sistematis dengan menyamakan fenomena isu hukum yang sedang dijumpai untuk diteliti dan kemudian dipakai sebagai landasan untuk menjawab mengenai problematika kebijakan euthanasia terhadap tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqāsid syari'ah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif, menyeluruh, sehingga terwujudnya hasil penelitian normatif yang apik. Teknik Analisa akan merujuk pada mekanisme penerapan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga terwujudkan hasil penelitian yang diharapkan.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Data yang diperoleh peneliti akan disusun melalui tahapan-tahapan diantaranya:

a. Editing

Tahapan *editing* adalah awalan dari penelitian ini melalui proses analisa dan pengkajian ulang melalui bahan-bahan yang relevan terkait masalah yang dibahas oleh peneliti yang diperoleh dari sumber pustaka maupun referensi lainnya. Tahapan ini

mempunyai tujuan agar informasi data yang diperoleh benar-banar valid dan sesuai dengan konteks pembahasan penelitian ini.

b. Verifikasi

Manfaat tahapan verifikasi bagi peneliti adalah untuk mengetahui keabsahan data informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang akan dipakai peneliti dalam penulisan skripsi ini.

c. Penutup

Concluding merupakan tahapan penarikan kesimpulan selama proses penulisan yang kemudian menghasilkan jawaban dari masalah atau isu hukum yang sedang di bahas oleh peneliti sesuai landasan yang telah diuraikan peneliti dalam bagian latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, penulis membuat sistematika pembahasan agar bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami isi skema dalam penulisan skripsi ini. Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, paparan hasil penelitian berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Pustaka, ketentuan dalam bab ini akan dibahas terkait dengan berbagai teori yang membahas mengenai permasalahan problematika kebijakan euthanasia terhadap pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun

2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqasid syari'ah. data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan yang mencakup tinjauan euthanasia meliputi pengertian euthanasia, macam-macam euthanasia. Selanjutnya, klasifikasi tindak pidana dalam KUHP yang meliputi pengertian tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. Serta euthanasia menurut prinsip maqasid syari'ah yang meliputi pengertian maqasid syari'ah, deskripsi umum maqasid syari'ah.

BAB III Problematika kebijakan euthanasia terhadap pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta menjelaskan pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana problematika euthanasia terhadap pasal 461 dan 462 dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

BAB 1V Problematika kebijakan *euthanasia* dalam pasal 461 dan 462 undang-undang no.1 tahun 2023 tentang tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqasid syariah, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta menjelaskan pertanyaan pada rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana problematika kebijakan euthanasia terhadap tindakan perampasan nyawa yang kemudian dikaitkan dengan prinsip maqasid syariah.

BAB V Penutup, pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya tentang problematika kebijakan euthanasia terhadap tindak pidana perampasan nyawa perspektif maqasid syariah.

Bagian Akhir Skripsi, pada bagian ini penulis melampirkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.